

PENGUATAN LITERASI PUBLIK DALAM PENGAWASAN ANGGARAN DAERAH MELALUI SOSIALISASI APBD

Ahmad Suryadi^{a*}, Andi Izman M. Padjalangi^b, Sitti Hardiyanti Arhas^c, Muhammad Luthfi Siraj^c, Suprianto^a, Muh. Imanuddin Akmal^a

^a Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa

^b Pimpinan Komisi B DPRD Prov. Sulawesi Selatan

^c Universitas Negeri Makassar

Kata Kunci:

APBD; keterlibatan masyarakat; literasi publik; partisipasi Masyarakat; pengawasan anggaran daerah

Keywords:

APBD; public literacy, civic engagement; community participation; regional budget monitoring

Penulis Koresponden:

Email: suryadisuryadi@itbm.ac.id

Abstrak: Pengawasan anggaran daerah memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial dalam sistem pemerintahan demokratis. Namun, rendahnya literasi publik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mekanisme pengawasannya menjadi hambatan utama partisipasi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi publik dalam pengawasan anggaran daerah melalui sosialisasi APBD di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif dengan melibatkan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra strategis dan narasumber. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, diskusi terarah, dan refleksi bersama. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep APBD dan mekanisme pengawasan partisipatif, perubahan persepsi dari sikap pasif menjadi aktif dalam pengawasan anggaran, serta terbentuknya komitmen untuk membentuk kelompok masyarakat pengawas anggaran daerah. Program ini berhasil memperkuat *civic engagement* masyarakat dalam pengawasan *governance* lokal.



© 2026 The Authors. Published by JPBD

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>

Pendahuluan

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen kebijakan fiskal utama pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mikesell, 2018). Namun, efektivitas penggunaan anggaran daerah sangat bergantung pada sistem pengawasan yang komprehensif, yang tidak hanya melibatkan

lembaga formal seperti DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial (Shah, 2007).

Pengawasan partisipatif masyarakat terhadap anggaran daerah merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi yang memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat dalam proses *governance* (Gaventa & McGee, 2013). Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme *check and balance*, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran kolektif

yang dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan konsep *civic engagement* yang dikemukakan oleh Putnam (2000) tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik untuk memperkuat modal sosial dan kualitas demokrasi.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat literasi publik tentang anggaran daerah dan mekanisme pengawasannya masih relatif rendah. Masyarakat umumnya memiliki pemahaman yang terbatas tentang struktur APBD, proses penyusunan anggaran, dan hak mereka untuk mengakses informasi serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah (Diamond & Morlino, 2005). Kondisi ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam *forum-forum* pengawasan anggaran, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan konsultasi publik, sehingga fungsi pengawasan partisipatif belum dapat berjalan secara optimal.

Rendahnya literasi publik tentang pengawasan anggaran daerah juga diperparah oleh keterbatasan akses informasi dan kompleksitas dokumen anggaran yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Informasi tentang APBD seringkali disajikan dalam format teknis yang tidak *user-friendly*, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memahami alokasi anggaran dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan di daerah mereka (Ansell & Gash, 2008). Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap apatis dan menganggap pengawasan anggaran sebagai tanggung jawab eksklusif pemerintah dan lembaga legislatif.

Kelurahan Gunung Sari di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, merupakan salah satu contoh wilayah yang menghadapi tantangan serupa dalam hal literasi publik tentang pengawasan anggaran daerah. Sebagai wilayah urban dengan tingkat heterogenitas sosial yang tinggi, masyarakat Kelurahan Gunung Sari memiliki potensi besar

untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pembangunan daerah. Namun, keterbatasan pemahaman tentang mekanisme pengawasan anggaran menjadi hambatan utama bagi terciptanya partisipasi yang efektif dan bermakna.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi publik tentang pengawasan anggaran daerah melalui pendekatan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik masyarakat. Pendekatan *edukatif-partisipatif* yang menggabungkan transfer pengetahuan dengan dialog interaktif dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan anggaran daerah (Freire, 2005). Metode ini tidak hanya memberikan informasi secara satu arah, tetapi juga menciptakan ruang untuk diskusi, pertukaran pengalaman, dan pembangunan komitmen kolektif untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif.

Keberhasilan program literasi publik juga sangat bergantung pada keterlibatan *stakeholder* yang tepat dan memiliki kredibilitas di mata masyarakat. Kolaborasi dengan anggota DPRD sebagai mitra strategis dapat memberikan legitimasi dan memperkuat efektivitas program sosialisasi (Bryson, 2018). Keterlibatan lembaga legislatif tidak hanya memberikan perspektif praktis tentang mekanisme pengawasan anggaran, tetapi juga menciptakan jalur komunikasi langsung antara masyarakat dengan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan konstitusional terhadap pemerintah daerah.

Pentingnya pendidikan masyarakat tentang pengawasan anggaran daerah juga didukung oleh teori pembelajaran transformatif yang menekankan bahwa perubahan perspektif dan perilaku dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang melibatkan refleksi kritis dan dialog interaktif (Mezirow, 2000). Aspek pengawasan anggaran, pembelajaran transformatif dapat membantu masyarakat untuk mengubah paradigma dari sikap pasif menjadi aktif dalam mengawasi kebijakan publik, sehingga tercipta

budaya transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat di tingkat *grassroot*.

Berdasarkan kondisi dan tantangan tersebut, program pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penguatan Literasi Publik dalam Pengawasan Anggaran Daerah melalui Sosialisasi APBD" dirancang untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat Kelurahan Gunung Sari dalam memahami dan mengawasi pengelolaan anggaran daerah. Program ini diharapkan dapat menjadi katalis untuk terciptanya masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam proses demokratisasi pengawasan keuangan publik, sekaligus memperkuat sistem *governance* yang partisipatif dan akuntabel di tingkat lokal.

Metode

Program pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penguatan Literasi Publik dalam Pengawasan Anggaran Daerah melalui Sosialisasi APBD" ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengawasi pengelolaan anggaran daerah. Metode yang diterapkan menggabungkan strategi pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) dengan prinsip-prinsip partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratisasi pengawasan keuangan publik (Knowles et al., 2015; Arnstein, 1969). Pendekatan edukatif-partisipatif dipilih berdasarkan teori pembelajaran transformatif yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran untuk mencapai perubahan perspektif yang berkelanjutan (Mezirow, 2000). Model ini juga sejalan dengan konsep *civic engagement* yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik (Putnam, 2000).

Subjek dalam kegiatan ini adalah masyarakat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang menjadi sasaran utama program literasi publik, dengan melibatkan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra strategis dan narasumber. Pemilihan mitra dari kalangan

legislatif bertujuan untuk memberikan legitimasi dan kredibilitas informasi yang disampaikan, sekaligus menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan lembaga pengawas anggaran daerah (Diamond & Morlino, 2005). Strategi kolaborasi dengan institusi pemerintah ini mengacu pada konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kemitraan multi-stakeholder dalam penyelenggaraan program publik (Ansell & Gash, 2008).

Pelaksanaan kegiatan dirancang sistematis melalui konsep *Educational Program Design* sebagaimana dijelaskan oleh (Tyler, 1949; Stufflebeam & Coryn, 2014), yaitu:

1. Tahap persiapan
Serangkaian kegiatan koordinatif dan administratif yang mencakup koordinasi intensif dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan tujuan kegiatan, pembagian peran, dan penyusunan agenda kegiatan. Perencanaan strategis dilakukan untuk merancang blueprint kegiatan yang mencakup penetapan target peserta, alokasi waktu, dan sumber daya yang diperlukan (Bryson, 2018). Selain itu, dilakukan survei dan seleksi lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat target, serta penyusunan materi sosialisasi yang komprehensif dan kontekstual sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan masyarakat lokal (Freire, 2005).
2. Tahap pelaksanaan
Diimplementasikan melalui format *hybrid* yang menggabungkan sesi penyampaian materi dan dialog interaktif. Sesi penyampaian materi berupa presentasi terstruktur mengenai konsep dasar APBD, meliputi definisi, komponen, dan siklus anggaran daerah (Shah, 2007), penjelasan mengenai struktur dan fungsi anggaran daerah dalam konteks pembangunan daerah (Mikesell, 2018), serta elaborasi mekanisme pengawasan partisipatif yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat (Gaventa & McGee, 2013). Sesi dialog

interaktif mencakup diskusi terbuka yang memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antara narasumber dan peserta, sesi tanya jawab yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengklarifikasi pemahaman dan menyampaikan perspektif lokal, serta forum sharing pengalaman terkait praktik pengelolaan anggaran daerah di tingkat komunitas. Metode dialog interaktif ini mengadopsi pendekatan Freirean yang menekankan pentingnya dialog kritis dalam proses pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat (Freire, 2005).

3. Tahap Evaluasi

Kegiatan dilakukan melalui pendekatan *mixed-method* yang mencakup evaluasi proses dan evaluasi hasil.

- a. Evaluasi proses meliputi observasi sistematis terhadap tingkat partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, dokumentasi dan analisis kualitas interaksi dalam sesi diskusi, serta penilaian terhadap relevansi dan efektivitas metode penyampaian materi; dan
- b. Evaluasi hasil mencakup refleksi kolektif mengenai tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, identifikasi perubahan persepsi dan sikap peserta terkait pentingnya pengawasan anggaran daerah, serta pengukuran capaian tujuan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Model evaluasi ini mengacu pada *framework* evaluasi Kirkpatrick yang mengukur efektivitas program pelatihan pada berbagai level (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif berupa pengamatan langsung terhadap dinamika kegiatan dan respons peserta (Spradley, 2016), diskusi terarah untuk mendokumentasikan hasil diskusi dan pertanyaan yang muncul

selama sesi interaktif (Krueger & Casey, 2014), serta refleksi bersama sebagai proses evaluasi kolaboratif yang melibatkan peserta, narasumber, dan tim pengabdian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan fokus pada tingkat pemahaman peserta terhadap materi APBD dan mekanisme pengawasannya, kualitas partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan, efektivitas metode sosialisasi yang diterapkan, serta rekomendasi untuk pengembangan program serupa di masa mendatang. Teknik analisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Hasil analisis menjadi dasar untuk menilai keberhasilan program dan merancang strategi pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dalam bidang literasi keuangan publik.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penguatan Literasi Publik dalam Pengawasan Anggaran Daerah melalui Sosialisasi APBD" telah dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 6 Desember 2025 di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, ibu-ibu PKK, pemuda karang taruna, dan masyarakat umum. Narasumber kegiatan adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang didampingi oleh tim pengabdian dari perguruan tinggi.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama satu hari penuh dengan agenda yang telah disusun secara sistematis. Kegiatan dimulai dengan registrasi peserta, pembukaan resmi oleh ketua tim pengabdian, sambutan dari perwakilan masyarakat, dan dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi utama. Suasana kegiatan berlangsung kondusif dengan dukungan fasilitas yang

memadai, termasuk ruang pertemuan yang representatif, sistem audio visual, dan konsumsi yang telah disiapkan panitia.

Gambar 1:

Foto pembukaan kegiatan sosialisasi APBD dengan banner kegiatan dan peserta yang hadir



Sumber: Dokumentasi kegiatan PKM, 2025

Koordinasi dengan berbagai pihak sebelum pelaksanaan kegiatan menunjukkan hasil yang memuaskan. Keterlibatan perangkat kelurahan dalam memobilisasi peserta dan menyediakan tempat kegiatan memberikan dampak positif terhadap kelancaran acara. Selain itu, dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyediakan narasumber yang kompeten turut memperkuat kredibilitas dan kualitas materi yang disampaikan kepada peserta.

Partisipasi dan Antusiasme Peserta

Berdasarkan hasil observasi partisipatif, tingkat partisipasi peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Peserta hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir dengan penuh perhatian.

Gambar 2:

Suasana diskusi interaktif dengan peserta yang aktif bertanya



Sumber: Dokumentasi kegiatan PKM, 2025

Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya

mereka mengajukan pertanyaan selama sesi tanya jawab dan ketertarikan yang besar terhadap materi pengawasan anggaran daerah, terutama terkait mekanisme pelaporan dan pengaduan jika menemukan indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.

Partisipasi aktif peserta juga tercermin dari keterlibatan mereka dalam diskusi kelompok kecil yang dibentuk selama sesi interaktif. Setiap kelompok menunjukkan dinamika diskusi yang hidup dengan berbagai pertanyaan dan *sharing* pengalaman terkait kondisi pembangunan di lingkungan mereka masing-masing. Peserta tidak segan untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka terkait transparansi penggunaan anggaran pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Gambar 3:

Tingkat engagement peserta



Sumber: Dokumentasi kegiatan PKM, 2025

Observasi terhadap bahasa tubuh dan ekspresi peserta selama kegiatan menunjukkan tingkat *engagement* yang positif. Peserta terlihat fokus mendengarkan penjelasan narasumber, mencatat poin-poin penting, dan aktif berdiskusi dengan peserta lain di sekitar mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga mampu mempertahankan perhatian peserta sepanjang kegiatan berlangsung.

Tingkat Pemahaman Peserta Terhadap Materi APBD

Hasil refleksi bersama di akhir kegiatan menunjukkan adanya peningkatan

pemahaman peserta tentang konsep APBD. Dalam sesi refleksi, sebagian besar peserta mampu menjelaskan kembali komponen utama APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang baik terhadap siklus anggaran daerah mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka memberikan contoh konkret dalam diskusi kelompok kecil.

Peningkatan pemahaman peserta juga tercermin dari kualitas pertanyaan yang berkembang selama sesi diskusi. Pada awal kegiatan, pertanyaan peserta masih bersifat umum dan dasar, seperti "apa itu APBD" dan "siapa yang membuat APBD". Namun seiring berjalannya sesi, pertanyaan peserta menjadi lebih spesifik dan aplikatif, seperti "bagaimana cara mengakses informasi detail penggunaan anggaran untuk program tertentu" dan "apa yang harus dilakukan jika menemukan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan di lingkungan kami".

Gambar 4:

Sesi presentasi materi APBD oleh narasumber dari DPRD Sulawesi Selatan



Sumber: Dokumentasi kegiatan PKM, 2025

Kemampuan peserta dalam mengaitkan materi APBD dengan konteks lokal mereka menunjukkan terjadinya internalisasi pengetahuan yang efektif. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai program pembangunan di kelurahan mereka dan mulai mempertanyakan sumber pendanaan serta mekanisme pengawasannya. Beberapa peserta bahkan menyampaikan rencana untuk lebih aktif mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di

tingkat RT/RW sebagai bentuk implementasi dari pemahaman yang mereka peroleh.

Pemahaman Mekanisme Pengawasan Partisipatif

Melalui diskusi terarah, teridentifikasi bahwa mayoritas peserta mulai memahami peran mereka dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai saluran pengawasan yang dapat digunakan, seperti melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), forum konsultasi publik, dan mekanisme pengaduan masyarakat. Beberapa peserta bahkan menyampaikan pengalaman mereka yang pernah terlibat dalam kegiatan musrenbang namun belum memahami kaitannya dengan pengawasan anggaran.

Gambar 5:

Peserta dalam sesi diskusi kelompok membahas mekanisme pengawasan



Sumber: Dokumentasi kegiatan PKM, 2025

Diskusi tentang mekanisme pengawasan partisipatif menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam proses demokratisasi pengawasan keuangan daerah. Peserta mulai memahami bahwa pengawasan bukan hanya tentang mencari kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga tentang memastikan bahwa program pembangunan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Mereka juga memahami pentingnya dokumentasi dan bukti dalam melakukan pengawasan yang konstruktif.

Salah satu aspek penting yang muncul

dalam diskusi adalah pemahaman peserta tentang mekanisme pengaduan dan pelaporan yang tersedia. Peserta menunjukkan ketertarikan yang besar untuk mengetahui prosedur formal dalam menyampaikan laporan atau pengaduan terkait dugaan penyimpangan anggaran. Mereka juga mulai memahami pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, DPRD, dan lembaga pengawas lainnya dalam melakukan fungsi pengawasan yang efektif dan bertanggung jawab.

Kualitas Interaksi dalam Sesi Diskusi

Sesi diskusi berlangsung dengan sangat dinamis dan interaktif. Berdasarkan dokumentasi diskusi terarah, pertanyaan yang diajukan peserta mencakup berbagai aspek seperti mekanisme pengawasan APBD, cara melaporkan dugaan penyimpangan anggaran, akses informasi anggaran daerah, dan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kualitas pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengkontekstualisasikannya dengan kondisi riil di lingkungan mereka.

Interaksi yang terjadi antara peserta dengan narasumber menunjukkan adanya komunikasi dua arah yang efektif. Narasumber dari DPRD tidak hanya menyampaikan materi secara monolog, tetapi juga aktif merespons pertanyaan dan memberikan penjelasan tambahan sesuai dengan kebutuhan peserta. Hal ini menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang optimal. Peserta juga saling berinteraksi dalam diskusi kelompok, berbagi pengalaman dan perspektif mereka tentang kondisi pembangunan di lingkungan masing-masing.

Gambar 6:

Dokumentasi sesi tanya jawab dengan peserta yang mengajukan pertanyaan



Sumber: Dokumentasi kegiatan PKM, 2025

Dinamika diskusi juga menunjukkan adanya pembelajaran *peer-to-peer* di antara peserta. Peserta yang memiliki pengalaman lebih dalam organisasi masyarakat atau pernah terlibat dalam kegiatan pemerintahan desa aktif berbagi pengetahuan mereka kepada peserta lain. Hal ini memperkaya proses pembelajaran dan menciptakan jaringan pengetahuan yang saling mendukung di antara peserta. Suasana diskusi yang terbuka dan demokratis memungkinkan setiap peserta untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa terbatas oleh status sosial atau latar belakang pendidikan.

Perubahan Persepsi dan Sikap Peserta

Hasil refleksi bersama menunjukkan adanya perubahan positif dalam persepsi peserta terhadap pentingnya pengawasan anggaran daerah. Dalam diskusi awal, banyak peserta yang menyampaikan pandangan bahwa pengawasan anggaran adalah tanggung jawab eksklusif pemerintah dan DPRD. Namun setelah sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Perubahan persepsi yang signifikan juga

terlihat dari sikap peserta terhadap partisipasi dalam kegiatan pemerintahan desa. Sebelumnya, banyak peserta yang menganggap bahwa keterlibatan mereka dalam musrenbang atau forum-forum lainnya hanya bersifat seremonial dan tidak memiliki dampak nyata. Setelah memahami mekanisme pengawasan anggaran, peserta mulai menyadari bahwa partisipasi aktif mereka dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas program pembangunan di daerah mereka.

Transformasi sikap peserta juga tercermin dari meningkatnya kesadaran mereka tentang pentingnya transparansi informasi publik. Peserta mulai memahami hak mereka untuk mengakses informasi tentang anggaran dan penggunaannya, serta kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi tersebut secara terbuka. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan literasi publik yang tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem demokratis.

Komitmen Tindak Lanjut

Di akhir kegiatan, melalui diskusi pleno, terbentuk komitmen bersama untuk melakukan tindak lanjut berupa pembentukan kelompok masyarakat pengawas anggaran daerah di tingkat kelurahan. Sejumlah peserta menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota aktif kelompok tersebut. Selain itu, peserta juga menyepakati untuk mengadakan pertemuan rutin guna membahas perkembangan penggunaan anggaran daerah dan berbagi informasi terkait program-program pembangunan di wilayah mereka.

Komitmen yang terbentuk tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mencakup rencana aksi konkret yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek dan menengah. Peserta menyepakati untuk membentuk struktur organisasi sederhana dengan pembagian tugas yang jelas, termasuk koordinator, sekretaris, dan anggota yang bertanggung

jawab untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Mereka juga merencanakan untuk mengadakan pertemuan bulanan sebagai forum diskusi dan evaluasi terhadap perkembangan program pembangunan di kelurahan.

Aspek penting lainnya dari komitmen tindak lanjut adalah kesepakatan untuk membangun jaringan komunikasi dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk perangkat kelurahan, anggota DPRD, dan lembaga pengawas lainnya. Peserta menyadari bahwa efektivitas pengawasan partisipatif memerlukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas dan akses informasi yang lebih luas. Mereka juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas mereka melalui pembelajaran berkelanjutan dan berbagi pengalaman dengan kelompok serupa di kelurahan lain.

Pembahasan

Efektivitas Pendekatan Edukatif-Partisipatif

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan dalam program sosialisasi APBD terbukti efektif dalam meningkatkan literasi publik tentang pengawasan anggaran daerah. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran transformatif Mezirow (2000) yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran untuk mencapai perubahan perspektif yang berkelanjutan. Tingginya tingkat partisipasi peserta dan kualitas interaksi yang dinamis selama sesi diskusi menunjukkan bahwa metode ini berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan memotivasi peserta untuk terlibat secara aktif.

Keberhasilan pendekatan ini juga didukung oleh penerapan prinsip-prinsip andragogi (Knowles et al., 2015) yang mempertimbangkan karakteristik pembelajaran orang dewasa. Peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan aplikasi praktis dari materi

yang disampaikan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan transfer pengetahuan yang signifikan, terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali konsep APBD dan mengaitkannya dengan konteks lokal mereka.

Efektivitas metode edukatif-partisipatif juga tercermin dari terjadinya proses pembelajaran *peer-to-peer* di antara peserta. Interaksi horizontal yang terjadi selama diskusi kelompok memungkinkan peserta untuk saling belajar dari pengalaman dan perspektif masing-masing, sehingga memperkaya proses pembelajaran secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran sosial yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam konstruksi pengetahuan dan perubahan sikap (Bandura, 1977).

Peran Kolaborasi Multi-Stakeholder

Keterlibatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra strategis dan narasumber memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kredibilitas dan legitimasi informasi yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) tentang pentingnya kemitraan *multi-stakeholder* dalam penyelenggaraan program publik. Kehadiran narasumber dari kalangan legislatif tidak hanya memberikan perspektif praktis tentang proses pengawasan anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kolaborasi ini juga berhasil menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan lembaga pengawas anggaran daerah, sebagaimana diharapkan dalam konsep *democratic governance* (Diamond & Morlino, 2005). Peserta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mekanisme kerja DPRD dalam mengawasi keuangan daerah, sekaligus memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam proses pengawasan tersebut melalui berbagai saluran partisipasi yang tersedia. Hal ini

menciptakan sinergi yang konstruktif antara pengawasan formal oleh lembaga negara dan pengawasan informal oleh masyarakat.

Keberhasilan kolaborasi *multi-stakeholder* dalam program ini juga menunjukkan pentingnya membangun trust dan mutual *understanding* antara berbagai pihak yang terlibat dalam *governance*. Keterbukaan DPRD untuk terlibat langsung dalam program literasi publik mencerminkan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menunjukkan pengakuan terhadap peran penting masyarakat dalam sistem pengawasan demokratis. Model kolaborasi ini dapat menjadi rujukan untuk program serupa di daerah lain dengan adaptasi sesuai konteks lokal masing-masing.

Peningkatan Civic Engagement Masyarakat

Perubahan persepsi peserta dari menganggap pengawasan anggaran sebagai tanggung jawab eksklusif pemerintah menjadi memahami peran aktif masyarakat dalam pengawasan menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan *civic engagement*. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Putnam (2000) tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik sebagai manifestasi dari modal sosial yang kuat. Peningkatan kesadaran ini tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan *behavioral* peserta.

Peningkatan *civic engagement* juga tercermin dari komitmen peserta untuk membentuk kelompok masyarakat pengawas anggaran daerah sebagai tindak lanjut kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa program berhasil menciptakan kesadaran kritis masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses demokratisasi, sekaligus membangun kapasitas organisasi untuk aksi kolektif. Pembentukan kelompok ini merupakan indikator konkret dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam *governance* lokal dan dapat menjadi embrio untuk pengembangan *civil society* yang lebih

kuat di tingkat kelurahan.

Transformasi dari sikap apatis menjadi proaktif dalam mengawasi kebijakan publik menunjukkan terjadinya *empowerment* pada level individual dan komunitas. Peserta tidak lagi melihat diri mereka sebagai objek pasif dari kebijakan pemerintah, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki *agency* untuk mempengaruhi kualitas *governance* di daerah mereka. Hal ini sejalan dengan konsep *empowerment* yang dikemukakan oleh Freire (2005) tentang pentingnya mengembangkan kesadaran kritis masyarakat untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Implementasi Pendekatan Freirean dalam Konteks Lokal

Penerapan metode dialog interaktif yang mengadopsi pendekatan Freirean (Freire, 2005) terbukti efektif dalam menciptakan proses pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan masyarakat. Kualitas pertanyaan yang diajukan peserta menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengkontekstualisasikannya dengan kondisi riil di lingkungan mereka. Hal ini mencerminkan tercapainya tujuan pendidikan kritis yang mendorong peserta untuk menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekedar objek penerima informasi.

Dialog kritis yang terjalin selama sesi diskusi berhasil menciptakan ruang untuk dekonstruksi pemahaman lama tentang pengawasan anggaran dan rekonstruksi pemahaman baru yang lebih partisipatif dan demokratis. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis tentang APBD, tetapi juga mengembangkan kesadaran kritis tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Proses ini menunjukkan terjadinya *conscientizacao* atau peningkatan kesadaran kritis yang merupakan inti dari pedagogi Freire.

Keberhasilan implementasi pendekatan Freirean juga terlihat dari kemampuan

peserta untuk mengidentifikasi masalah-masalah konkret di lingkungan mereka dan menghubungkannya dengan isu pengawasan anggaran daerah. Peserta tidak lagi melihat masalah pembangunan sebagai sesuatu yang *given* atau tidak dapat diubah, tetapi mulai memahami bahwa mereka memiliki peran dalam memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Transformasi *consciousness* ini merupakan fondasi penting untuk aksi kolektif yang berkelanjutan dalam mengawasi *governance* lokal.

Keberlanjutan Program dan Dampak Jangka Panjang

Komitmen peserta untuk membentuk kelompok masyarakat pengawas anggaran daerah dan mengadakan pertemuan rutin menunjukkan potensi keberlanjutan program yang baik. Hal ini sejalan dengan prinsip *community development* yang menekankan pentingnya membangun kapasitas lokal yang berkelanjutan (Rothman et al., 2001). Terbentuknya struktur organisasi masyarakat yang fokus pada pengawasan anggaran daerah diharapkan dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam jangka panjang dan berkontribusi pada peningkatan kualitas *governance* di tingkat kelurahan.

Namun demikian, keberlanjutan program ini memerlukan dukungan yang konsisten dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan perguruan tinggi sebagai fasilitator. Diperlukan program pendampingan lanjutan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang terbentuk dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tanpa dukungan berkelanjutan, terdapat risiko bahwa antusiasme awal peserta akan menurun seiring berjalannya waktu, terutama ketika mereka menghadapi tantangan praktis dalam mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh.

Dampak jangka panjang program ini tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan

anggaran, tetapi juga berpotensi menciptakan efek *multiplier* dalam pengembangan kapasitas masyarakat sipil di tingkat lokal. Kelompok masyarakat pengawas yang terbentuk dapat menjadi *nucleus* untuk pengembangan inisiatif-inisiatif lain dalam bidang *governance*, seperti pengawasan pelayanan publik, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *social capital* yang menekankan pentingnya jaringan sosial dan norma timbal balik dalam memfasilitasi kerjasama untuk kepentingan bersama (Coleman, 1988). Dengan demikian, program ini berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan demokrasi partisipatif di tingkat *grassroot*.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, hasil kegiatan ini memperkuat validitas teori pembelajaran transformatif dan pendekatan partisipatif dalam konteks pendidikan masyarakat Indonesia. Keberhasilan program menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas dan motivasi yang tinggi untuk terlibat dalam proses pengawasan kebijakan publik, asalkan diberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai melalui metode yang tepat. Hal ini memberikan kontribusi empiris terhadap *literature* tentang *civic education* dan *community empowerment* dalam konteks negara berkembang, khususnya dalam setting masyarakat urban di Indonesia.

Program ini juga memberikan bukti empiris tentang efektivitas pendekatan *collaborative governance* dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Keterlibatan langsung anggota DPRD sebagai narasumber tidak hanya meningkatkan kredibilitas informasi, tetapi juga menciptakan jalur komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan lembaga perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dapat dikombinasikan secara sinergis untuk menciptakan *governance* yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat.

Secara praktis, program ini memberikan model yang dapat direplikasi di daerah lain dengan adaptasi sesuai konteks lokal. Keterlibatan mitra dari kalangan legislatif terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan yang dapat diadopsi dalam program serupa. Selain itu, pendekatan yang menggabungkan transfer pengetahuan dengan pembangunan komitmen aksi kolektif menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Model ini dapat menjadi rujukan bagi perguruan tinggi, LSM, dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam merancang program literasi publik yang berdampak nyata terhadap penguatan demokrasi lokal.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat "Penguatan Literasi Publik dalam Pengawasan Anggaran Daerah melalui Sosialisasi APBD" di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Pendekatan *edukatif-partisipatif* terbukti efektif meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep APBD dan mekanisme pengawasan partisipatif, yang ditunjukkan melalui tingkat partisipasi tinggi dan kualitas interaksi dinamis selama kegiatan. Program berhasil mengubah persepsi masyarakat dari menganggap pengawasan anggaran sebagai tanggung jawab eksklusif pemerintah dan DPRD menjadi memahami peran aktif mereka dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Kolaborasi dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra strategis memberikan dampak signifikan terhadap kredibilitas program dan menciptakan jalur komunikasi efektif antara masyarakat dengan lembaga pengawas anggaran daerah. Komitmen peserta membentuk kelompok masyarakat pengawas anggaran daerah menunjukkan potensi keberlanjutan program yang baik dan diharapkan menjadi mekanisme kontrol sosial efektif untuk meningkatkan kualitas *governance* di tingkat kelurahan dalam jangka

panjang.

Program ini perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan dukungan dari berbagai stakeholder. Pemerintah Kota Makassar disarankan menyediakan akses informasi APBD yang lebih transparan melalui *platform* digital yang user-friendly, sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat memperluas program serupa ke kelurahan lain dengan menyediakan pendampingan berkelanjutan bagi kelompok masyarakat pengawas yang telah terbentuk. Perguruan tinggi hendaknya mengintegrasikan program literasi publik pengawasan anggaran ke dalam kurikulum pengabdian masyarakat dan mengembangkan riset lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap kualitas *governance* lokal. Masyarakat diharapkan mempertahankan konsistensi kelompok pengawas melalui pertemuan rutin dan membangun jaringan koordinasi dengan kelompok serupa di kelurahan lain, sementara program selanjutnya perlu menambahkan komponen pelatihan teknis analisis anggaran dan sistem monitoring-evaluasi yang lebih sistematis untuk mengukur dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat dan kualitas *governance* lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa yang telah memberikan dukungan institusional melalui penerbitan surat tugas dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Penghargaan yang mendalam disampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bersedia menjadi mitra strategis dan narasumber, memberikan kontribusi signifikan terhadap kredibilitas dan efektivitas program. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah memberikan izin dan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan, serta kepada seluruh masyarakat Kelurahan Gunung Sari yang terdiri dari tokoh

masyarakat, pengurus RT/RW, ibu-ibu PKK, pemuda karang taruna, dan warga masyarakat umum yang telah berpartisipasi aktif dengan antusiasme dan komitmen tinggi, menjadikan kegiatan sosialisasi "Penguatan Literasi Publik dalam Pengawasan Anggaran Daerah melalui Sosialisasi APBD" ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan civic engagement masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Diamond, L., & Morlino, L. (2005). *Assessing the quality of democracy*. Johns Hopkins University Press.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum International Publishing Group.
- Gaventa, J., & McGee, R. (2013). The impact of transparency and accountability initiatives. *Development Policy Review*, 31(s1), 53

- s28. <https://doi.org/10.1111/dpr.12017>
- Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2016). *Kirkpatrick's four levels of training evaluation*. ATD Press.
- Knowles, M. S., Holton III, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2014). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Mezirow, J. (2000). *Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress*. Jossey-Bass.
- Mikesell, J. L. (2018). *Fiscal administration: Analysis and applications for the public sector* (10th ed.). Cengage Learning.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rothman, J., Erlich, J. L., & Tropman, J. E. (2001). *Strategies of community intervention* (6th ed.). F.E. Peacock Publishers.
- Shah, A. (2007). *Participatory budgeting*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6923-4>
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Waveland Press.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Tyler, R. W. (1949). *Basic principles of curriculum and instruction*. University of Chicago Press.